



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR P.47/Menlhk/Setjen/OTL.0/5/2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN NOMOR P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/ Menlhk/ Setjen/ OTL.0/ 1/ 2016 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;
- b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/ Menlhk/ Setjen/ OTL.0/ 1/ 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat kekeliruan penulisan terkait kedudukan kantor dan wilayah kerja pada Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum dan Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/ Menlhk/ Setjen/ OTL.0/ 1/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan

- Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
  7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
  10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
  11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.169/MenLHK-II/2015 tentang Penunjukan Unit Induk dan Pembina Teknis Organisasi Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai surat Nomor B/468/M.PAN-RB/01/2016 tanggal 22 Januari 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK TAMAN NASIONAL.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Lampiran V angka I Nomor 4 dan Lampiran V angka III Nomor 20 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/ Menlhk/ Setjen/ OTL.0/ 1/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, sehingga keseluruhan Lampiran V menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/ Menlhk/ Setjen/ OTL.0/ 1/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- b. Lampiran V Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/ Menlhk/ Setjen/ OTL.0/ 1/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 832

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

Ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.47/Menlhk/Setjen/OTL.0/5/2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR P.7/ Menlhk/ Setjen/ OTL.0/ 1/ 2016  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS TAMAN NASIONAL

NAMA, TIPE, LOKASI DAN WILAYAH KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN NASIONAL

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi Kantor	Subbagian/ Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
I	BALAI BESAR TN TIPE A			
1.	Kerinci Seblat Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Selatan	Sungai Penuh	1. Bagian Tata Usaha/ Sungai Penuh.  2. Bidang Teknis Konservasi TN/ Jambi.  3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Jambi  4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Solok  5. Bidang Pengelolaan TN Wil. III/ Rejang Lebong	1. Subbagian Umum/ Sungai Penuh. 2. Subbagian Program dan Kerjasama/ Sungai Penuh. 3. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan/ Sungai Penuh.  4. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan / Sungai Penuh 5. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Jambi  6. SPTN Wil. I/ Kayu Aro. 7. SPTN Wil. II/Bangko.  8. SPTN Wil. III/ Painan. 9. SPTN Wil. IV/ Sangir.  10. SPTN Wil. V/ Lubuk Linggau. 11. SPTN Wil. VI/ Argamakmur.
2.	Gunung Gede Pangrango Provinsi Jawa Barat	Cibodas	1. Bagian Tata Usaha/ Cibodas.  2. Bidang Teknis Konservasi TN/ Cibodas.	1. Subbagian Umum/ Cibodas. 2. Subbagian Program dan Kerjasama/ Cibodas. 3. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan / Cibodas.  4. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan/ Cibodas. 5. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Cibodas.

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi Kantor	Subbagian/ Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
			3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Cugenang.  4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Selabintana.  5. Bidang Pengelolaan TN Wil. III/ Caringin.	6. SPTN Wil. I/ Cibodas. 7. SPTN Wil. II/ Gedeh.  8. SPTN Wil. III/ Selabintana. 9. SPTN Wil. IV/ Situ Gunung.  10. SPTN Wil. V/ Bodogol. 11. SPTN Wil. VI/ Tapos.
3.	Gunung Leuser Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara	Medan	1. Bagian Tata Usaha/ Medan.  2. Bidang Teknis Konservasi TN/ Medan.  3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Tapak Tuan.  4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Kutacane.  5. Bidang Pengelolaan TN Wil. III / Stabat.	1. Subbagian Umum/ Medan. 2. Subbagian Program dan Kerjasama/ Medan. 3. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan / Medan.  4. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan/ Medan. 5. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Medan.  6. SPTN Wil. I/ Blang Pidie. 7. SPTN Wil. II/ Kluet Utara.  8. SPTN Wil. III/ Blangkejeren. 9. SPTN Wil. IV/ Badar.  10. SPTN Wil. V/ Bohorok. 11. SPTN Wil. VI/ Besitang
4.	Betung Kerihun dan Danau Sentarum Provinsi Kalimantan Barat	Putussibau	1. Bagian Tata Usaha/ Putussibau.  2. Bidang Teknis Konservasi TN/ Putussibau.  3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Matasso.  4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Kedamin.  5. Bidang Pengelolaan TN Wil. III/ Lanjak.	1. Subbagian Umum/ Putussibau. 2. Subbagian Program dan Kerjasama/ Putussibau. 3. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan / Putussibau.  4. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan / Putussibau. 5. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Putussibau.  6. SPTN Wil. I/ Lanjak. 7. SPTN Wil. II/ Tanjung Kerja.  8. SPTN Wil. III/ Padua Mendalam. 9. SPTN Wil. IV/ Nanga Era.  10. SPTN Wil. V/ Lanjak. 11. SPTN Wil. VI/ Semitau
5.	Lore Lindu Provinsi Sulawesi Tengah	Palu	1. Bagian Tata Usaha/ Palu.	1. Subbagian Umum/ Palu. 2. Subbagian Program dan Kerjasama/ Palu.

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi Kantor	Subbagian/ Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
			2. Bidang Teknis Konservasi TN/ Palu.  3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Saluki  4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Makmur  5. Bidang Pengelolaan TN Wil. III/ Poso	3. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan / Palu.  4. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan/ Palu. 5. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Palu.  6. SPTN Wil. I/ Mataue. 7. SPTN Wil. II/ Gimpu.  8. SPTN Wil. III/ Tongoa. 9. SPTN Wil. IV/ Bora.  10. SPTN Wil. V/ Lengkeka. 11. SPTN Wil. VI/ Wuasa.
6.	Teluk Cendrawasih Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua	Manokwari	1. Bagian Tata Usaha/ Manokwari.  2. Bidang Teknis Konservasi TN / Manokwari.  3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Nabire.  4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Wasior.  5. Bidang Pengelolaan TN Wil. III/ Yembekiri.	1. Subbagian Umum/ Manokwari. 2. Subbagian Program dan Kerjasama/ Manokwari. 3. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan / Manokwari.  4. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan/ Manokwari. 5. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Manokwari.  6. SPTN Wil. I/ Kwatisore. 7. SPTN Wil. II/ Yeretuar.  8. SPTN Wil. III Aisandami. 9. SPTN Wil. IV/ Roon.  10. SPTN Wil. V/ Rumberpoon. 11. SPTN Wil. VI/ Windesi.
II	<u>BALAI BESAR TN TIPE B</u>			
1.	Bukit Barisan Selatan Provinsi Lampung	Kota Agung	1. Bagian Tata Usaha/ Kota Agung.  2. Bidang Teknis Konservasi TN/ Kota Agung.  3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Semaka.	1. Subbagian Umum/ Kota Agung. 2. Subbagian Program dan Kerjasama/ Kota Agung. 3. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan / Kota Agung.  4. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan/ Kota Agung. 5. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Kota Agung.  6. SPTN Wil. I/ Sukaraja. 7. SPTN Wil. II/ Bengkunt.



No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi Kantor	Subbagian/ Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
			4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Liwa.	8. SPTN Wil. III/ Krui. 9. SPTN Wil. IV/ Bintuhan.
2.	Bromo Tengger Semeru Provinsi Jawa Timur	Malang	1. Bagian Tata Usaha/ Malang.  2. Bidang Teknis Konservasi TN/ Malang.  3. Bidang Pengelolaan TN Wil. I/ Wonorejo  4. Bidang Pengelolaan TN Wil. II/ Purworejo.	1. Subbagian Umum/ Malang. 2. Subbagian Program dan Kerjasama/ Malang. 3. Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan/ Malang.  4. Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan/ Malang. 5. Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan/ Malang.  6. SPTN Wil. I/ Cemorolawang 7. SPTN Wil. II/ Tumpang.  8. SPTN Wil. III/ Senduro. 9. SPTN Wil. IV/ Pronojiwo.
III	<u>BALAI TN TIPE A</u>			
1.	Batang Gadis Provinsi Sumatera Utara	Panyabungan	----	1. Subbag Tata Usaha/ Panyabungan. 2. SPTN Wil. I/ Siabu. 3. SPTN Wil. II/ Kota Nopan. 4. SPTN Wil. III/ Muarasoma.
2.	Berbak dan Sembilang Provinsi Jambi	Jambi	----	1. Subbag Tata Usaha/ Jambi. 2. SPTN Wil. I/ Suak Kandis/Sungai Rambut 3. SPTN Wil. II/ Sunsang/ Sungai Sembilang. 4. SPTN Wil. III/ Air Hitam Laut/ Tanah Pilih
3.	Way Kambas Provinsi Lampung	Labuhan Ratu	----	1. Subbag Tata Usaha / Labuhan Ratu. 2. SPTN Wil. I/ Way Kanan. 3. SPTN Wil. II/ Bungur. 4. SPTN Wil. III/ Kuala Penet.
4.	Ujung Kulon Provinsi Banten	Labuan	----	1. Subbag Tata Usaha / Labuan. 2. SPTN Wil. I/ Pulau Panaitan. 3. SPTN Wil. II/ Pulau Handeuleum. 4. SPTN Wil. III/ Sumur.
5.	Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	Jakarta	----	1. Subbag Tata Usaha/ Jakarta. 2. SPTN Wil. I/ Pulau Kelapa. 3. SPTN Wil. II/ Pulau Harapan. 4. SPTN Wil. III/ Pulau Pramuka.
6.	Gunung Halimun-Salak Provinsi Jawa Barat	Kabandungan	----	1. Subbag Tata Usaha/ Kabandungan. 2. SPTN Wil. I/ Cipanas. 3. SPTN Wil. II/ Nanggung. 4. SPTN Wil. III/ Pelabuhan Ratu.
7.	Meru Betiri Provinsi Jawa Timur	Jember	----	1. Subbag Tata Usaha/ Jember. 2. SPTN Wil. I/ Sarongan. 3. SPTN Wil. II/ Ambulu. 4. SPTN Wil. III/ Kalibaru.

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi Kantor	Subbagian/ Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
8.	Bali Barat Provinsi Bali	Gilimanuk	----	1. Subbag Tata Usaha/ Gilimanuk. 2. SPTN Wil. I/ Jembrana. 3. SPTN Wil. II/ Buleleng. 4. SPTN Wil. III/ Labuan Lalang.
9.	Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur	Labuan Bajo	----	1. Subbag Tata Usaha/ Labuan Bajo. 2. SPTN Wil. I/ Loh Buaya. 3. SPTN Wil. II/ Loh Liang. 4. SPTN Wil. III/ Padar.
10.	Tanjung Puting Provinsi Kalimantan Tengah	Pangkalan Bun	----	1. Subbag Tata Usaha/ Pangkalan Bun. 2. SPTN Wil. I/ Pembuanghulu. 3. SPTN Wil. II/ Kuala Pembuang. 4. SPTN Wil. III/ Tanjung Harapan.
11.	Sebangau Provinsi Kalimantan Tengah	Palangkaraya	----	1. Subbag Tata Usaha/ Palangkaraya. 2. SPTN Wil. I/ Palangkaraya. 3. SPTN Wil. II/ Pulang Pisau. 4. SPTN Wil. III/ Kasongan.
12.	Kayan Mentarang Provinsi Kalimantan Timur	Malinau	----	1. Subbag Tata Usaha/ Malinau. 2. SPTN Wil. I/ Long Bawan. 3. SPTN Wil. II/ Long Alango. 4. SPTN Wil. III/ Long Ampung.
13.	Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara	Bau-Bau	----	1. Subbag Tata Usaha/ Bau-bau 2. SPTN Wil. I/ Wanci. 3. SPTN Wil. II/ Ambeua. 4. SPTN Wil. III/ Waha.
14.	Rawa Aopa Watumohai Provinsi Sulawesi Tenggara	Tinanggea	----	1. Subbag Tata Usaha/ Tinanggea. 2. SPTN Wil. I/ Angata. 3. SPTN Wil. II/ Rarowatu. 4. SPTN Wil. III/ Ladongi.
15.	Kepulauan Togean Provinsi Sulawesi Tengah	Ampana	----	1. Subbag Tata Usaha / Ampana. 2. SPTN Wil. I/ Wakai. 3. SPTN Wil. II/ Lebiti. 4. SPTN Wil. III/ Popolii.
16.	Bogani Nani Wartabone Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo	Kotamobagu	----	1. Subbag Tata Usaha/ Kotamobagu. 2. SPTN Wil. I/ Suwawa. 3. SPTN Wil. II/ Doloduo. 4. SPTN Wil. III/ Maclang.
17.	Aketajawe - Lolobata Provinsi Maluku Utara	Sofifi	----	1. Subbag Tata Usaha/ Sofifi. 2. SPTN Wil. I/ Weda. 3. SPTN Wil. II/ Maba. 4. SPTN Wil. III/Subaim.
18.	Wasur Provinsi Papua	Merauke	----	1. Subbag Tata Usaha/ Merauke. 2. SPTN Wil. I/ Agrindo. 3. SPTN Wil. II/ Ndalir. 4. SPTN Wil. III/ Wasur.
19.	Lorentz Provinsi Papua	Wamena		1. Subbag Tata Usaha/ Wamena. 2. SPTN Wil. I/ Timika. 3. SPTN Wil. II/ Wamena. 4. SPTN Wil. III/ Nabire.

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi Kantor	Subbagian/ Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
20.	Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti Provinsi Nusa Tenggara Timur	Waingapu	----	1. Subbag Tata Usaha/ Waingapu. 2. SPTN Wil. I/ Waibakul. 3. SPTN Wil. II/ Lewa. 4. SPTN Wil. III/ Tanarara.
IV	<u>BALAI TN TIPE B</u>			
1.	Tesso Nilo Provinsi Riau	Pangkalan Kerinci	----	1. Subbag Tata Usaha/ Pangkalan Kerinci. 2. SPTN Wil. I/ Lubuk Kembang Bunga. 3. SPTN Wil. II/ Basra.
2.	Siberut Provinsi Sumatera Barat	Padang	----	1. Subbag Tata Usaha/ Padang. 2. SPTN Wil. I/ Maileppet. 3. SPTN Wil. II/ Muara Sikabalu.
3.	Bukit Tiga Puluh Provinsi Riau dan Provinsi Jambi	Rengat Barat	----	1. Subbag Tata Usaha/ Rengat Barat. 2. SPTN Wil. I/ Tebo Tengah, Kab. Tebo. 3. SPTN Wil. II/ Belilas, Kab. Indragiri Hulu.
4.	Bukit Dua Belas Provinsi Jambi	Sarolangun	----	1. Subbag Tata Usaha/ Sarolangun. 2. SPTN Wil. I/ Muara Bulian. 3. SPTN Wil. II/ Muara Tebo
5.	Gunung Ciremai Provinsi Jawa Barat	Kuningan	----	1. Subbag Tata Usaha/ Kuningan. 2. SPTN Wil. I/ Kuningan. 3. SPTN Wil. II/ Majalengka.
6.	Karimunjawa Provinsi Jawa Tengah	Semarang	----	1. Subbag Tata Usaha/ Semarang. 2. SPTN Wil. I/ Pulau Kemujan. 3. SPTN Wil. II/ Pulau Karimunjawa.
7.	Gunung Merbabu Provinsi Jawa Tengah	Boyolali	----	1. Subbag Tata Usaha/ Boyolali. 2. SPTN Wil. I/ Kopeng. 3. SPTN Wil. II/ Krogowanan.
8.	Gunung Merapi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Sleman	----	1. Subbag Tata Usaha / Sleman. 2. SPTN Wil. I/ Magelang. 3. SPTN Wil. II/ Boyolali.
9.	Baluran Provinsi Jawa Timur	Banyuputih	----	1. Subbag Tata Usaha/ Banyuputih. 2. SPTN Wil. I/ Bekol. 3. SPTN Wil. II/ Karangtekok.
10.	Alas Purwo Provinsi Jawa Timur	Banyuwangi	----	1. Subbag Tata Usaha/ Banyuwangi. 2. SPTN Wil. I/ Tegaldlimo. 3. SPTN Wil. II / Muncar.
11.	Gunung Rinjani Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram	----	1. Subbag Tata Usaha/ Mataram. 2. SPTN Wil. I/ Kayangan. 3. SPTN Wil. II/ Selong.
12.	Kelimutu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ende	----	1. Subbag Tata Usaha / Ende. 2. SPTN Wil. I/ Moni. 3. SPTN Wil. II/ Detusoko.
13.	Tambora Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dompu	----	1. Subbag Tata Usaha/ Dompu 2. SPTN Wil. I/ Kore. 3. SPTN Wil. II/ Pekat/Kempo

No	Tipe/ Nama Balai Taman Nasional/ Provinsi	Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/ Bidang/ Lokasi Kantor	Subbagian/ Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/ Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
14.	Bukit Baka Bukit Raya Provinsi Kalimantan Barat	Sintang	----	1. Subbag Tata Usaha/ Sintang. 2. SPTN Wil. I/ Nanga Pinoh. 3. SPTN Wil. II/ Kasongan.
15.	Gunung Palung Provinsi Kalimantan Barat	Ketapang	----	1. Subbag Tata Usaha/ Ketapang. 2. SPTN Wil. I/ Sukadana. 3. SPTN Wil. II/ Teluk Melano.
16.	Kutai Provinsi Kalimantan Timur	Bontang	----	1. Subbag Tata Usaha/ Bontang. 2. SPTN Wil. I/ Sangatta. 3. SPTN Wil. II/ Tenggarong.
17.	Taka Bone Rate Provinsi Sulawesi Selatan	Benteng	----	1. Subbag Tata Usaha/ Benteng. 2. SPTN Wil. I/ Tarupa. 3. SPTN Wil. II/ Jinato.
18.	Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan	Bantimurung	----	1. Subbag Tata Usaha/ Bantimurung. 2. SPTN Wil. I/Balocci 3. SPTN Wil. II/ Kamba
19.	Bunaken Provinsi Sulawesi Utara	Manado	----	1. Subbag Tata Usaha/ Manado. 2. SPTN Wil. I/ Meras. 3. SPTN Wil. II/ Tambala.
20.	Manusela Provinsi Maluku	Masohi	----	1. Subbag Tata Usaha/ Masohi. 2. SPTN Wil. I/ Wahai. 3. SPTN Wil. II/ Tehoru.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

Ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SITI NURBAYA